

## ABSTRAK

Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Dan Tanpa Menggunakan Abk WNI Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, Randy Yohanes Igidio Ximenes,19310023. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah motif terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia? 2) Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia? 3) Bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terhadap pelaku? Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. 2) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. 3) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terhadap pelaku. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Motif terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah: a) Karena rasa kemanusiaan dari terdakwa untuk memberikan pekerjaan kepada ABK. b) Karena faktor kedekatan dengan ABK. 2) Modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah: a) Terdakwa membeli bahan bakar solar dan bensin untuk kapal, b) Berangkat menuju rumpon dan melakukan pengangkapan ikan. 3) Akibat Hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terhadap pelaku dan akibat hukum adalah: a. Terhadap pelaku yaitu: 1) Pelaku di pidana penjara, 2) Pelaku membayar denda, 3) Pelaku membayar biaya perkara. b. Terhadap barang bukti yaitu: 1) Barang bukti diampas untuk dimusnahkan. 2) Barang bukti dikembalikan kepada pemilik.

***Kata Kunci: Tindak Pidana Penangkapan Ikan, Anak Buah Kapal.***

## ABSTRACT

Description of the Crime of Catching Fish Without a Sailing Approval Letter and Without Using Indonesian Crew Crew in Indonesian Fisheries Management Areas, Randy Yohanes Igidio Ximenes, 19310023. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the motive for the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in Indonesian fisheries management areas? 2) What is the mode of action of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area? 3) What are the legal consequences of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area for the perpetrator? The objectives of the research are: 1) To determine the motive for the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area. 2) To find out the mode of action of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area. 3) To determine the legal consequences of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area for the perpetrator. This research is descriptive in nature and the type of research is normative research. The independent variables in this research are the motive, mode and legal consequences of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area against the perpetrator.

Based on the description in the previous chapters, it can be concluded that 1) the motive for the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area was: a) Because of the humanity of the defendant in providing work to the crew members. b) Due to the proximity factor to the crew. 2) The mode of action of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area is: a) The defendant bought diesel fuel and petrol for the boat, b) Departed for a FAD and carried out fishing. 3) The legal consequences of the criminal act of fishing without a sailing license and without using Indonesian crew members in the Indonesian fisheries management area for the perpetrator and the legal consequences are: a. against the perpetrator, namely: 1) the perpetrator is sentenced to prison, 2) the perpetrator pays a fine, 3) the perpetrator pays the court costs. b. Regarding evidence, namely: 1) Evidence is confiscated to be destroyed. 2) the evidence is returned to the owner.

**Keywords:** *Fishing Crime, Ship Crew.*